

Pendahuluan

Pendidikan adalah upaya dasar yang direncanakan untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran di mana siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang berdasarkan hukum (Fatmawati et al., 2020).

Pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa "Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berfungsi dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis (Fatmawati & Sholikin, 2019).

Pendidikan itu sangat penting, namun beberapa masyarakat tidak mampu mengaksesnya. Berbagai ragam

masalah yang sering dihadapi salah satunya termasuk tuntutan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan yang tinggi, yang menyebabkan beberapa orang memilih untuk bekerja daripada meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan, menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022-Maret 2023

Daerah	Tahun	Jumlah penduduk miskin	Presentasi penduduk miskin
Perkotaan	Sept 2022	11.82	7.50
	Sept 2022	11.98	7.53
	Mar 2023	11.74	7.29
Pendesaan	Mar 2022	14.34	12.29
	Sep 2022	14.38	12.36
	Mar 2022	14.16	12.22
	Mar	26.16	9.54

selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan di angka 151.08%, dan pada tahun 2023 juga mengalami penurunan namun hanya mencapai 149.94%. Hal ini menjadi salah satu penghambat akses masyarakat ke pendidikan, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Oleh karena itu dengan adanya beasiswa ini diharapkan menjadi fasilitas masyarakat yang kurang mampu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga program beasiswa ini dapat mempermudah akses masyarakat untuk menempuh dunia pendidikan (Solikhin, 2016).

Sejatinya kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sangat rumit dan memberikan dampak ke berbagai bidang terutama pendidikan. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, mulai dari pemberian BLT bagi masyarakat ekonomi lemah, adanya kartu Indonesia Pintar, pendidikan gratis, perbaikan dan perkembangan kampung. Namun, pada kenyataannya angka kemiskinan tetap tinggi. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan, dan tingginya angka harapan lama sekolah, serta kenaikan angka pemikahan dini. Atas

dasar itu, diharapkan dengan adanya pemberian beasiswa ini mampu untuk mempermudah masyarakat di Kabupaten Lamongan dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga dengan berkesinambungannya program beasiswa ini dari tahun 2022 hingga hari ini, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemerataan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.3 Angka Harapan Lama Sekolah Lamongan Tahun (2021-2023)

Angka Harapan Lam Sekolah Lamongan Tahun (2021-2023)			
Tahun	2021	2022	2023
%	13,77	14,01	14,02

Sumber: BPS Kab. Lamongan Tahun (2021-2023)

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2021 hingga tahun 2023 angka harapan lama sekolah terus mengalami peningkatan. Hal itu yang mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk terus berkomitmen dalam mengatasi permasalahan tersebut. Atas dasar, itu program beasiswa perintis ini salah satu wujud ataupun bentuk strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan minat

pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Bupati Lamongan dalam Program Beasiswa ini mengatakan Beasiswa Berkualitas Dan Gratis diharapkan mampu mempunyai dampak pada pemerataan pendidikan, program ini juga diharapkan mampu dalam meningkatkan Angka Lama Sekolah, serta untuk meningkatkan Indeks Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan, mencegah pemiskinan dini dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan untuk menarik investasi dari luar.

Hubungan kemiskinan dan Pendidikan menjadi dua hal yang saling memiliki keterkaitan. Di satu sisi dampak kemiskinan di dunia pendidikan salah satunya ialah, banyaknya anak putus sekolah dikarenakan tidak memiliki biaya. Sedangkan pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya

mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian. Namun, pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya.

Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan salah satu permasalahan dari masalah pendidikan adalah faktor kemiskinan. Sehingga alasan kemiskinan ini menjadikan banyaknya anak yang mengalami putus sekolah dikarenakan masalah biaya.

Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan jaminan pemerataan pendidikan di Lamongan melalui Program Beasiswa Pendidikan Berkualitas dan Gratis (PERINTIS). Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa

Pendidikan bagi Mahasiswa melalui Program beasiswa PERIN TIS. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu ingin berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri di Jawa dan Bali atau Swasta di Kabupaten Lamongan. Karena keterbatasan dana yang tersedia, maka perlu adanya seleksi untuk menentukan penerima beasiswa tersebut.

Sasaran dari program pemberian bantuan beasiswa pendidikan ini adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di daerah dan diutamakan yang belum menerima bantuan serupa/sejenis dari sumber dana baik APBN, APBD Provinsi Jawa Timur maupun sumber dana lainnya. Beasiswa ini diperuntukan bagi mahasiswa S 1, baik itu mahasiswa baru dan atau perpanjangan yang berasal dari keluarga kurang sejahtera dan atau memiliki prestasi/Hafidz yang sedang belajar di Perguruan Tinggi Swasta Kabupaten Lamongan dan Perguruan Tinggi Negeri Jawa-Bali.

Bentuk bantuan beasiswa pendidikan adalah bantuan Pemerintah Daerah berupa beasiswa yang diberikan dalam bentuk uang dan

bersifat stimulant. Adapun alokasi anggaran beasiswa mahasiswa SI melalui program "PERINTIS" dari keluarga tidak mampu dan atau berprestasi diberikan satu kali dalam satu tahun dan dengan masa perpanjangan beasiswa tersebut. dikatakan bersifat stimulant, artinya adanya program ini diharapkan dapat membangkitkan generasi muda untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka hingga ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Selain itu diadakan program beasiswa ini yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan yang berdaya saing.

Permasalahan informasi mengenai beasiswa sering kali terjadi karena kurangnya sosialisasi yang efektif, sehingga banyak calon penerima beasiswa tidak mengetahui adanya kesempatan tersebut atau tidak paham persyaratan dan prosedur pendaftarannya. Hal ini mengakibatkan peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang menjadi terlewatkan. Sosialisasi program beasiswa merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan kesempatan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. N

amun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan kendala dalam pelaksanaan sosialisasi program beasiswa yang efektif.

Oleh karena itu, dibentuk Peraturan Bupati No. 34, tahun 2022 tentang pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, bahwa ada beberapa syarat untuk mendapatkan beasiswa yaitu salah satu caranya adalah dengan mengikuti atau memperhatikan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah agar dapat diberikan sesuai dengan kriteria penerima yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Sesuai dengan kebijakan tersebut, maka persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan kepada calon penerima beasiswa antara lain:

- WNI
- Siswa kelas 12 SMA/SMK/ sederajat atau alumni gapyear 2022 dan 2023 yang masih berkesempatan ikut SNBT 2023
- Siswa dari keluarga tidak mampu dibuktikan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau kartu Indonesia pintar (KIP) atau sejenisnya

- Punya tekad besar masuk PTN lewat jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri
- Mengikuti akun Instagram @beasiswaperintis dan membagikan postingan Beasiswa Perintis 2024.

Tabel 1.4 Jumlah Penerima Beasiswa Berkualitas dan Gratis di Kabupaten Lamongan

No	PTS/PTN	Tahun	Jumlah Penerima
1.	Negeri	2019	158
	Swasta		138
2.	Negeri	2020	120
	Swasta		94
3.	Negeri	2021	168
	Swasta		71
4.	Negeri	2022	177
	Swasta		132
5.	Negeri	2023	230
	Swasta		127

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lamongan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, merupakan perolehan capaian target penerima beasiswa miskin berprestasi sesuai dengan penerima setiap tahunnya. Adapun kenaikan dan penurunan angka penenma setiap tahunnya dengan besaran dana yang didapat untuk mahasiswa di kampus

negeri berjumlah Rp. 4.000.000.00 juta, sementara untuk mahasiswa di kampus swasta berjumlah Rp. 3.000.000.00 juta.

Pelaksanaan program pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu jenjang pendidikan dasar ini didasarkan atas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lamongan dalam Program beasiswa Perintis. Dengan adanya bantuan beasiswa tersebut diharapkan siswa dari keluarga tidak boleh putus sekolah karena alasan tidak mampu memenuhi pendidikan.

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu daerah. Mulai dari peningkatan angka lama sekolah yang ada di Kabupaten Lamongan ini semakin lama semakin meningkat, peningkatan indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan, mengurangi angka kemiskinan melalui pendidikan hingga mencegah pemikahan dini. Namun, pemerataan pendidikan di Kabupaten Lamongan masih belum optimal. Hal ini

terlihat dari masih adanya kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan partisipasi pendidikan. Selanjutnya Kualitas pendidikan juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan, Namun, kualitas pendidikan di Kabupaten Lamongan masih perlu ditingkatkan.

Program beasiswa perintis di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Program ini diperuntukkan bagi siswa-siswi berprestasi dari keluarga kurang mampu yang berasal dari daerah pelosok. Program ini diharapkan dapat membantu siswa• siswi tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Lamongan.

Akan tetapi berdasarkan informasi dan yang ditemukan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan beasiswa tersebut entah karena masalah administrasi ataupun prestasi yang diperoleh untuk mendapatkan beasiswa berkualitas dan gratis ini.

situasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan terkait dengan Program Penyaluran Beasiswa Berkualitas dan Gratis (PERINTIS).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pendidikan Berkualitas Dan Gratis (Perintis) Bagi Mahasiswa di Kabupaten Lamongan.

Program beasiswa PERINTIS adalah beasiswa yang berupa bantuan dana yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan, beasiswa ini diperuntukan terutama bagi masyarakat Daerah Lamongan yang kurang mampu. Sebelum program beasiswa PERINTIS, program beasiswa di Kabupaten Lamongan sudah ada yang bernama beasiswa Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Setelah Bupati Lamongan terpilih dan melanjutkan program beasiswa tersebut, maka ada penggantian nama untuk program beasiswa yang awalnya bernama program beasiswa Pemkab berubah nama menjadi program beasiswa PERINTIS. Program tersebut pelopor utamanya adalah Bupati Lamongan. Sejalan dengan visi beliau di bidang pendidikan yakni PERINTIS, "Pendidikan berkualitas dan gratis". Maka dengan adanya program ini diharapkan anak-anak di Lamongan dapat menempuh pendidikan hingga 12

tahun dapat tercapai serta mahasiswa dalam kategori kurang mampu dan mahasiswa yang memiliki prestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Chusnu Yuli Setyo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan.

"Beasiswa ini sebenarnya dari pak Bupati yang mencetuskan program PERINTIS, kenapa kok perintis menjadi program unggulan,. Karena yang pertama bagaimana anak-anak ini pembelajar selama 12 tahun itu anak-anak lamongan ini tercapai semua, paling dasar ya anak-anak pendidikan dasar itu tuntas semua, jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah karena masalah biaya. Makanya kemudian diambilkan solusi itu, nah berikutnya mahasiswa juga. mahasiswa itu dibagi 2 mahasiswa karena memang berprestasi dan memang dari keluarga tidak mampu. Beasiswa yang di kalangan mahasiswa ini tidak banyak kuotanya. beasiswa ini juga untuk pemerataan pendidikan, diharapkan agar anak lamongan ini jangan sampai ada yang tidak kuliah dikarenakan masalah biaya Pendidikan"

Berdasarkan wawancara tersebut, program beasiswa ini wujud dari kepedulian pemerintah Kabupaten Lamongan tentang pentingnya

survei di rumah calon penerima beasiswa. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan verifikasi dan divalidasi untuk selanjutnya dilakukan seleksi bagi calon penerima. Dengan demikian penentuan penerima beasiswa dapat ditetapkan sesuai kriteria/penentuan yang ada.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Thu Siti Rurniasih selaku staf bagian urusan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan.

"Sebenarnya proses tahapan penerima calon beasiswa ini lumayan Panjang, hal itu dikarenakan pertama mahasiswa melakukan pendaftaran serta perberkas dan nantinya dikumpulkan lalu dicek apakah ada data yang tidak sesuai atau kurang lengkap. Selanjutnya input data dan setelah itu dibentuk tim survey dibagi tiap kecamatan yang bertugas dilapangan untuk mendatangi rumah pendaftar tersebut. Setelah mendapat data dilapangan maka tim survei tersebut mempresentasikan hasil data lapangan yang diperoleh. Barulah nanti ada validasi data dan perbandingan data mana yang lebih layak menerima beasiswa ini "

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program PERINTIS ini tahapan seleksi bagi calon penerima beasiswa ini cukup panjang. Adanya survei lapangan secara langsung oleh tim survei yang dibagi di seluruh kecamatan yang ada di

Lamongan, yang bertugas turun ke lapangan guna memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan memenuhi kriteria calon penerima beasiswa. Pelaksanaan beasiswa ini harus benar-benar dijalankan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Chusnu Yuli Setyo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan.

"beasiswa itu dari anggaran APBD maka mulai dari perencanaan kemudian penyusunan menyusun SK peraturan Bupati, berapa peraturan Bupati nya kemudian sampai anggaran diketok di dewan, karena semua terlibat dalam kebijakan ini, Bagaimana beasiswa ini bisa diimplementasikan, tidak semata-mata beasiswa ini ada anggaran langsung diberikan, mulai dari perencanaan, mulai mapping di dinas kemudian kebutuhannya, kekurangannya, penambahan yang dikaji berkali untuk beasiswa ini".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat difahami bahwa anggaran dalam pelaksanaan program beasiswa ini berasal dari APBD. Seluruh jajaran pemerintahan ikut andil dalam menyelenggarakan program beasiswa ini. Mulai dari Bupati, Anggota Dewan dan seluruh jajaran yang ada di Dinas Pendidikan.

mas. Karena di Lamongan sendiri seluruh kampus masih swasta, nah jadi perbedaan jumlah dana tersebut juga sudah dipertimbangkan, dan kampus negeri belum ada di Lamongan. Dana yang diberikan bagi mahasiswa negeri juga dapat digunakan untuk menempuh PTN di luar Daerah lamongan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui faktor yang membedakan jumlah dana yang diberikan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta berbeda. Hal itu dapat dilihat dikarenakan perguruan tinggi negeri di Kabupaten Lamongan belum ada, sehingga dana yang diberikan juga dapat digunakan untuk menempuh perguruan tinggi negeri di luar Daerah Lamongan.

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya di penyajian data fokus penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan model implementasi program dari George Edward III dengan tujuan untuk mengetahui proses implementasi

Program PERINTIS di Kabupaten Lamongan. Proses tersebut meliputi dari 4 unsur,yaitu; pertama komunikasi, kedua sumber daya, ketiga disposisi dan yang keempat adalah struktur birokrasi. Adapun keempat unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Pelaksanaan progam PERINTIS dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Anggaran progam beasiswa ini berasal dari APBD, dalam pelaksanaan progam beasiswa ini, melibatkan seluruh elemen pemerintahan dari mulai Bupati, Anggota Dewan, dan seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Progam ini dilaksanakan setiap tahun dan ada sistem perpanjangan beasiswa.

program pada saat resepsi kenegaraan di pendopo Lamongan, setelah itu barn diedarkan oleh Dinas Pendidikan melalui website resmi Dinas Pendidikan, dan sosial media instagram PERIN TIS. Program beasiswa ini adalah program yang di bentuk oleh Bupati Lamongan yang diselenggarakan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Wawancara dengan Kavita Nur Iswari selaku Mahasiswa penerima beasiswa berkualitas dan gratis beliau mengatakan bahwa.

"Untuk beasiswa perintis saya barn dengar, dahulunya saya mendapat beasiswa pemkab, menurut saya program beasiswa yang saya dapat yang sekarang ganti nama jadi perintis ya sudah bagus dan berjalan dengan baik, tapi untuk informasi kurang tersebar luas terutama di desa2, saya selalu dapat informasi mengenai beasiswa dari kampus mas. Pada saat pendaftaran gaono pungutan biaya opo-0po ya cuma keluar uang buat riwa-riwi pemberkasan saja dan beli materai untuk kelengkapan berkas, untuk dari program itu ga ada pungutan biaya apapun."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dalam proses penyampaian informasi mengenai program beasiswa sudah berjalan dengan baik, akan tetapi mahasiswa sering kali familiar dengan nama beasiswa pemkab, perlu

adanya tindak lanjut mengenai sosialisasi untuk program perintis. Program ini sudah berjalan dengan baik, saat pendaftaran sampai pengumuman, tidak ada pungutan biaya apapun dalam program perintis.

Wawancara dengan Eko Kusuma Izharul Ulum selaku mahasiswa yang tidak menerima program beasiswa berkualitas dan gratis mengatakan.

"Penyampaian program beasiswa berkualitas dan gratis ini berjalan dengan baik, tapi masih terdapat kendala seperti keterbatasan dalam bermedia sosial untuk mengetahui program beasiswa berkualitas dan gratis ini serta kurangnya sosial langsung kepada masyarakat terutama dipendesaan, dikarenakan masih banyak masyarakat pelosok desa yang kurang mampu dan seharusnya menerima beasiswa ini, malah justru tidak mengetahui program beasiswa ini".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa beberapa masyarakat banyak yang belum mengetahui program tersebut dikarenakan minimnya bermedia sosial dan masih banyak masyarakat di pelosok desa yang belum mengetahui program beasiswa PERINTIS serta ada ketidaksesuaian antara yang seharusnya menerima dan yang seharusnya tidak menerima program tersebut.

berkualitas dan gratis tersebut. Banyak masyarakat yang masih familiar dengan program beasiswa pemkab, perlu adanya tindak lanjut mengenai sosialisasi, agar program beasiswa PERIN TIS bisa merata ke seluruh daerah Lamongan hingga ke pelosok desa dan dalam variabel komunikasi juga menentukan keberhasilan dari implementasi program.

Sumber Daya

Para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif, implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pelaksanaan program PERINTIS ini tidak menitikberatkan pada beberapa pihak saja, dalam program ini ada pihak penanggungjawab dan pihak yang bertugas dalam pelaksanaan program PERINTIS. Pihak yang bertanggung jawab dalam program ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, namun untuk pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan ada pembagian tugas masing dari Sub

Bagian yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Bu Siti Rumiasih selaku staf bagian umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan.

“untuk jumlah sumber daya kita menargetkan seluruh elemen yang ada di Dinas Pendidikan, mulai dari bapak kepala dinas, pak Sekdin, dari tim survey juga dari kasubag pak kasi dan pak kabid yang lain terkait program beasiswa ini dari semua elemen perbidang itu nanti ada perwakilannya masing-masing. Jadi kabid kasi terus Kadin sekdin perbidang masing-masing terus ada lagi tambahan dari tim survei yang melaksanakan survei, dan penanggungjawab utama sebagai pak Kadin. Anggarannya melekat pada bagian umum”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bagaimana pelaksanaan program beasiswa ini untuk para sumber daya manusia yang bertugas dan bertanggung jawab atas terleselenggaranya program ini. Adapun tambahan tim survei yang turun ke lapangan untuk memastikan layak atau tidaknya mahasiswa untuk menerima program beasiswa ini.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Thu Siti Rumiasih selaku staf bagian umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan.

membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan ada urusan lain yang harus diselesaikan dikantor. Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya rangkap tugas yang dilakukan oleh petugas tim survei.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Pelaksanaan program harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa dalam prosedur tahapan yang sudah ditetapkan harus memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan dengan maksimal apabila dalam pelaksanaan program tersebut memenuhi tahapan prosedur.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Chusnu Yuli Setyo Selaku

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan.

“Berkaitan dengan proses pelaksanaan dalam implementasi kebijakan program beasiswa berkualitas dan gratis di kabupaten lamongan, beliau mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan sudah berjalan sesuai prosedur dengan proses yang terstruktur dan sudah ditetapkan (SOP). Panitia pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diberikan tugas dan amanah serta tanggung jawab dari Kepala Dinas Pendidikan. Meski begitu beliau juga mengatakan bahwa banyak hambatan dilingkup administrasi dikarenakan data dari pendaftar tidak sesuai dengan keadaan lapangan”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat difahami bahwa dalam pelaksanaan program tersebut sudah memiliki SOP dalam pelaksanaan program agar tujuan dan sasaran dapat dioptimalkan dan tidak membutuhkan proses yang lama. Proses pelaksanaan program harus ada kesinambungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, agar memudahkan proses komunikasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Bu Siti Rumiasih selaku staf bagian umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan.

komitmen dari pengendali juga sangat baik.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Chusnu Yuli Setyo Selaku Sekretris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan.

“Baik mas, untuk tim pengendali sudah ada pembagian tugas masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan. Semua tim pengendali progam ini sudah menjalankan tugas dan kewajiban dengan maksimal, dan menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa untuk tim pengendali progam PERINTIS sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing serta menjalankan tugas dengan maksimal. Dan dengan adanya tim pengendali progam PERINTIS ini diharapkan agar penyelenggaraan progam beasiswa ini benar-benar tepat sasaran dan bisa membantu para pelajar di Kabupaten Lamongan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Faktor Eksternal

Kebutuhan masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ada 4 faktor salah satunya adanya sumber daya manusia dan dukungan para pengendali progam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti, bahwa dalam pelaksanaan progam beasiswa PERINTIS di Kabupaten Lamongan di dukung dengan adanya sumber daya manusia dan tim pengendali progam beasiswa ini, dengan adanya kebutuhan masyarakat yang kurang mampu untuk mempermudah dalam mengakses pendidikan melalui progam beasiswa PERINTIS. Sehingga progam ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten lamongan menyelenggarakan progam beasiswa PERINTIS melalui dinas pendidikan, progam ini diperuntukan bagi masyarakat daerah lamongan yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan masyarakat yang memiliki prestasi. Dengan adanya progam tersebut, diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Faktor Penghambat

Faktor Internal

Kendala Tim Seleksi

Adanya kendala dalam administrasi dalam seleksi penentuan calon penerirna beasiswa benar-benar harus di pastikan bahwa data yang didapat sesuai dengan data yang ada

diperoleh dari calon penerirna, dari data tersebut nantinya akan rnernberikan hasil akhir untuk bakal calon penerirna progarn beasiswa ini.

Keterbatasan Jumlah Dan Waktu Tim Survei

Adanya keterbatasan jumlah tim survei dan waktu untuk turun kelapangan dalarn rnengumpuln data yang diperoleh dari hasil menyurvei rumah masyarakat pendaftar. Dikarenakan tim survei1 diambilkan dari tenaga kontrak dan waktu untuk survei terbatas dikarenakan sering bertabrakan dengan tugas di kantor dan lokasi yang sulit di jangkau.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Siti Rumiasih selaku staf bagian umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan.

"Untuk tim survei sudah ada pembagiannya sendiri, untuk tim survei diambilkan dari tenaga kontrak yang ada di dinas pendidikan. Mungkin kendala yang sering di alami tim survei adalah ketika mereka masih ada tugas yang belum diselesaikan di kantor dan kesulitan untuk menemukan lokasi yang akan di survei, mungkin lokasinya yang berada di pelosok desa. Maka biasanya untuk survei lapangan ini sangat membutuhkan waktu yang lama".

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat difahami dalam pelaksanaan progam PERIN TIS terdapat kendala yang sering di alami oleh tim pelaksana khususnya dibagian tim seleksi dan tim survei. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam proses pencocokan, perbandingan, dan penentuan penerima progam PERIN TIS ini harus benar-benar sesuai dengan kriteria calon penerima progam beasiswa ini, sedangkan dari bagian tim survei mungkin keterbatasan jumlah dan waktu yang dilakukan untuk survei di lapangan. Tim survei yang diambilkan dari tenaga kontrak, sehingga hal itu membuat jam kerja kantor dan pelaksanaan survei terganggu dan membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik.

Kesimpulan

Progam beasiswa PERINTIS adalah beasiswa yang berupa bantuan dana yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan, beasiswa ini diperuntukan terutama bagi masyarakat Daerah Lamongan yang kurang mampu. Sebelum progam beasiswa PERINTIS, progam beasiswa di Kabupaten Lamongan sudah ada yang bernama beasiswa Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Setelah Bupati Lamongan terpilih dan

- Santoso, B., & Proyek, M. (2009). Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mudrikah, S., Pahleviannur, M. R., Surur, M., Rahrnah, N., Siahaan, M. N., Wahyuni, F. S., ... & Nurhayati, R. (2021). Perencanaan Pembelajaran di Sekolah: Teori dan Implementasi. Pradina Pustaka.
- Rosad, S. dan. (2020). Manajemen Pemasaran. Suparyanto Dan Rosad, 5(3), 248- li, B. A. B., & Teori, A. D. (1967). Implementasi Kebijakan Van Meter. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 5-24. <http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptummpp-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>
- Ustama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1-12.
- Arifin, M. B. U. B. (2018). Buku ajar metodologi penelitian pendidikan. Umsida Press, 1-143.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UINAntasari Banjarmasin. 17(33), 81-95.
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Jurnal**
- Qoiriyah, Ludfiyatul, Hari Lugis Purwanto, and Wiji Setiyaningsih. "Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jenis Beasiswa Menggunakan Knn." *RAINSTEK: Jurnal Terapan Sains & Teknologi* 1.2 (2019): 64-72.
- Nim, Desandi. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Bidikmisi Di Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat." *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (E-Journal)* 4.4 (2016).
- Haderani, H. (2018). Tinjauan Filosofis tentang Fungsi Pendidikan dalam Hidup Manusia. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 41-49. <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2103>.
- Fatmawati, N. I., Nugraheni, A. S., & Sholikin, A. (2020). Analisis kekerasan simbolik dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 40-53.
- Fatmawati, N. I., & Sholikin, A. (2019). Literasi Digital,

(peningkatan prestasi akademik)
terhadap prestasi mahasiswa. **Artikel**
Pemekab Lamongan, "Profil Lamongan",

<https://lamongankab.go.id/>,

diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan

<https://perintis.lamongankab.go.i>

diakses pada 25 Mei 2024.

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia
tentang sistem pendidikan
nasional, Pasal 1 ayat (1) UU No. 20
Tahun 2003.

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis
Pemberian Beasiswa Pendidikan
bagi siswa SD, SMP, SMA dan
Mahasiswa Melalui Program
PERINTIS